

MEMBANGUN MASYARAKAT INDONESIA BARU

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas

**Disampaikan pada Seminar Nasional Dies Natalis ke-50 HMI
Jakarta, 29 Januari 1997**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pendahuluan

Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada HMI, yang sekarang tengah memperingati tahun emasnya.

Saya juga mengucapkan terima kasih atas undangan HMI untuk memberikan sambutan pada Seminar Nasional Dies Natalis Ke-50 Himpunan Mahasiswa Islam. Adalah suatu kehormatan tersendiri bagi saya berbicara di depan forum mahasiswa yang memiliki sejarah begitu panjang dengan tradisi pemikiran yang begitu kuat, baik dalam pemikiran keagamaan maupun pemikiran-pemikiran sosial kemasyarakatan pada umumnya.

Panitia memberikan topik "Konstruksi Masyarakat Baru dan Model Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang" dalam undangan kepada saya. Ini adalah topik yang amat luas cakupannya. Mudah-mudahan judul yang saya pilih tidak terlalu jauh menyimpang dari topik yang diberikan. Saya memiliki alasan tersendiri untuk judul yang saya pilih tersebut. *Pertama*, dengan pembangunan nasional justru kita mestinya mampu membentuk konstruksi masyarakat yang kita inginkan. Jadi, kita bertindak pro-aktif dalam ikut mengarahkan wujud masyarakat yang kita inginkan. *Kedua*, saya merasa tidak ada suatu model pembangunan yang tunggal yang dapat diterapkan untuk negara-negara berkembang secara umum. Yang ada adalah model-model yang bisa diterapkan sesuai dengan nilai-nilai ideal, latar belakang sejarah, serta budaya masyarakat yang menjadi subjek pembangunan negara masing-masing.

Sebagai bangsa kita bersyukur telah mempunyai nilai-nilai dasar yang disepakati bersama, walaupun dalam sejarah kita telah banyak terjadi pergulatan pemikiran yang intens dan juga pergolakan politik yang tidak sedikit dalam menyepakati nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara kita itu.

Secara ideologis normatif kita mempunyai tiga tingkat nilai dasar yang harus menjadi pedoman, yakni pedoman idiil Pancasila, pedoman konstitusional UUD 1945, serta pedoman operasional GBHN. Dari ketiga nilai dasar ini, GBHN merupakan "jembatan" antara nilai-nilai dasar dengan nilai-nilai praksis. Karena itulah, di satu pihak GBHN dari waktu ke waktu (setiap lima tahun) harus mampu mencerminkan perubahan masyarakat, tetapi di lain pihak perubahan itu haruslah tetap mengacu kepada nilai-nilai yang lebih tinggi, yakni ideologi dan konstitusi. Inilah yang merupakan kerangka induk model pembangunan Indonesia.

Dalam konteks pembangunan negara kita, formulasi tentang masyarakat baru yang kita cita-citakan itu sendiri, menurut saya, tak lain adalah amanat GBHN 1993, yaitu bahwa masyarakat baru itu adalah yang **maju, mandiri, berkeadilan, dan sejahtera**.

Wujud masyarakat seperti apa yang akan menjamin tercapainya cita-cita di atas? Ini merupakan pertanyaan fundamental yang perlu kita cari jawabannya bersama.

Transformasi Menuju Masyarakat Baru

Masyarakat adalah suatu konsep sosial. Terdapat perbedaan yang nyata antara konsep masyarakat dengan konsep kolektif. Mempertukarkan keduanya mengandung kerancuan pemikiran. Konsep kolektif menggambarkan kumpulan manusia orang per orang secara fisik yang biasanya didasarkan atas karakteristik uniformitas. Sebaliknya, konsep masyarakat menggambarkan berkumpulnya manusia atas dasar sukarela yang tidak hanya terjadi secara fisik saja tetapi juga berupa keterikatan dan keterkaitan batiniahnya. Dalam konsep masyarakat terkandung makna kesatuan antara kebinekaan (*diversity*) dan kekhasan (*uniqueness*).

Walaupun tujuan masyarakat itu satu, dinamika masyarakat terbuka untuk mencapainya. Kebinekaan dengan demikian menjadi sifat tuntutan masyarakat agar komunitas yang dinamis selalu terwujud. Konsep masyarakat mengenal kepentingan bersama yang tanpa mengorbankan kepentingan individu. Oleh karena itu, “*what is common to all*” merupakan pertanyaan mendasar yang perlu terus dikomunikasikan atau didialogkan antar anggota masyarakat untuk menemukan “*common denominator*” dalam menjalin keterkaitan dan saling ketergantungan dengan tujuan yang sama.

Masyarakat mengalami proses evolusi. Proses evolusi ini pada dasarnya adalah proses *konstruksi-rekonstruksi*, yaitu yang lama digantikan yang baru. Proses evolusi merupakan proses meningkatnya kompleksitas suatu sistem. Meningkatkan kompleksitas ini diimbangi pula oleh makin meningkatnya stabilitas sistem tersebut. Daya inovasi masyarakat merupakan kunci terjadinya proses perubahan itu. Hanya melalui inovasi yang terjadi secara terus menerus masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang acapkali diciptakannya sendiri. Dalam dua abad terakhir ini, proses konstruksi-rekonstruksi sistem sosial ini terjadi makin cepat sebagai akibat dari “revolusi teknologi”.

Dengan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pengertian masyarakat “baru” tidak terlepas dari zamannya. “Baru” mengandung makna dimensi waktu sehingga arti “baru” tidak akan ada habis-habisnya.

Konstruksi masyarakat apa yang dapat menghasilkan suasana seperti itu pada zaman nanti, yaitu zaman globalisasi?

Dari berbagai literatur dalam zaman globalisasi terdapat empat ciri yang sifatnya esensial. **Pertama**, *economic drive* merupakan pemacu perilaku masyarakat. **Kedua**, *monetary incentives* hampir sebagai satu-satunya tolok ukur umum. **Ketiga**, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai instrumen utama keunggulan suatu bangsa. Dan **keempat**, keadilan atau ketidakadilan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan. Jadi, terwujudnya masyarakat baru yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan yang kita cita-citakan itu akan sangat tergantung dari kemampuan masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dengan ciri-ciri tersebut.

Proses konstruksi dan rekonstruksi, atau perubahan dari lama menjadi baru direkayasa agar berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan. Proses ini yang kita kenal dengan istilah “pembangunan”.

Gambaran Masyarakat Indonesia Dua Puluh Lima Tahun ke Depan

Dalam memasuki milenium yang baru, semua bangsa di dunia tidak terkecuali bangsa Indonesia, sedang mengalami transformasi besar-besaran dan amat mendasar dalam semua dimensi kehidupan: ekonomi, sosial, dan politik. Pada milenium baru itu, akan tumbuh masyarakat dunia baru dengan ciri-ciri yang berbeda dengan ciri-ciri masyarakat lama.

Kita juga sedang membangun sebuah masyarakat baru yang gambarannya telah kita miliki, sampai akhir PJP II, yakni sekitar tahun 2020.

Membangun masyarakat baru masa depan tidak dapat tidak mengandung dua dimensi, yaitu dimensi ideal, dan dimensi pragmatis. Idealisme ini penting untuk memberikan arah serta untuk menjaga agar bangsa kita tidak kehilangan *sense of being* dan *sense of purposenya*. Singkatnya jatidirinya, atau *khittahnya* sebagai bangsa.

Kita juga harus pragmatis, karena mewujudkan sesuatu yang ideal bisa memerlukan waktu yang lama, bahkan akan merupakan upaya yang tidak hentinya (*unending quest*). Dengan prinsip pragmatis kita menyusun tahap dan jadwal, dan membuat agenda-agenda untuk tahap-tahap tersebut. Dalam melakukan upaya itu, kita pertimbangkan kondisi kita sekarang, potensi yang bisa dikembangkan, kendala-kendala dan tantangan. Atas dasar itu kita tetapkan tolok ukur dan sasaran. Tolok ukur dan sasaran itu ada yang bisa dikuantifikasikan, tetapi ada yang hanya bisa bersifat kualitatif.

Kita telah memiliki gambaran masa depan itu dengan cukup terinci. Dalam berbagai kesempatan hal ini telah saya utarakan dan telah pula dipublikasikan dengan cukup luas, sehingga tidak perlu kiranya berpanjang-panjang saya ulangi di sini.

Yang jelas kita telah membayangkan kondisi kemakmuran kita pada sekitar tahun 2020 itu. Pendapatan per kapita kita akan menjadi empat kali lebih besar dari awal PJP II dalam nilai riilnya. Dengan jumlah penduduk yang besar, ekonomi kita sudah akan menjadi salah satu ekonomi besar di dunia.

Cermin dari kemakmuran tidak hanya produk domestik bruto (PDB) per kapita, tetapi juga pemerataannya. Kita merencanakan bahwa jauh sebelum PJP II berakhir, kemiskinan sebagai wujud yang terburuk dari kesenjangan telah dapat kita selesaikan sebagai suatu masalah nasional.

Kesenjangan masih belum akan hilang, baik antargolongan pendapatan, atau antardaerah, tetapi kecenderungan melebarinya kesenjangan itu telah dapat kita hentikan. Hal itu didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang makin baik di segala lapisan masyarakat, sebagai hasil dari upaya di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk gizi yang akan makin intensif kita beri perhatian di waktu-waktu yang akan datang. Di antara berbagai ukurannya adalah laju pertumbuhan penduduk akan terus berkurang sampai di bawah satu persen, dan usia harapan hidup rata-rata bertambah dengan sepuluh tahun.

Taraf kesejahteraan masyarakat juga akan dicerminkan, dan dalam proses selanjutnya akan didukung, oleh berkembangnya lapisan menengah yang akan menjadi tulang punggung masyarakat kita, termasuk masyarakat ekonominya.

Proses kemajuan tersebut akan dibarengi dan saling memperkuat dengan proses kemandirian. Sebelum PJP II berakhir, kita harapkan Indonesia telah mandiri dalam sumber daya pembangunannya. Bukan berarti tidak ada pinjaman, atau tidak ada aliran modal dari luar, karena pinjam-meminjam dan arus keluar masuk modal sudah akan menjadi ciri ekonomi dunia yang terbuka, melainkan berarti faktor-faktor tersebut tidak terlalu menentukan bagi kesehatan ekonomi kita.

Kita menyadari bahwa manusia tidak hanya mendambakan perbaikan ekonomi. Oleh karena itu, bersamaan dengan transformasi sosial ekonomi, kita juga akan mengalami proses transformasi sosial budaya.

Proses transformasi sosial ekonomi dan sosial budaya berlangsung secara bersamaan, keduanya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Yang satu merupakan sebab dan akibat dari yang lain, dan satu sama lain saling mempengaruhi, bisa memperkuat, tetapi juga bisa memperlemah. Oleh karena itu, proses transformasi sosial budaya ini memerlukan perhatian yang besar pula, bahkan mungkin perlu lebih dicermati, karena acapkali di situlah letak akar persoalannya.

Transformasi Sosial Budaya

Kita harus mengembangkan nilai-nilai sosial budaya kita, kalau kita ingin dapat memanfaatkan globalisasi sehingga menguntungkan bagi bangsa kita. Dengan nilai-nilai demikian, maka berbagai input fisik seperti pengetahuan teknis atau keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan, atau derajat gizi dan kesehatan, akan dapat diramu menjadi kekuatan produktif, yang tangguh dalam persaingan.

Oleh karena itu, secara mendasar saya melihat proses transformasi itu, yaitu proses membangun masyarakat baru itu sebagai sebuah proses kebudayaan. Ia meliputi seluruh aspek kebudayaan, baik itu aspek sosial, ekonomi maupun politik.

Di bidang kebudayaan sosial misalnya, yakni nilai-nilai yang mengatur interaksi antarwarga masyarakat, jelas kita harus mengadakan pembaruan. Pembaruan mempunyai makna perubahan, baik dengan menerima nilai baru, menafsirkan nilai lama secara baru, maupun mewujudkan berbagai nilai ke dalam berbagai perilaku yang baru. Baru di sini diartikan dalam dua dimensi, yaitu (a) berbeda dengan yang sudah ada, dan (b) disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada.

Dalam kerangka pandang itu, pertama-tama masyarakat Indonesia yang baru adalah masyarakat yang berkeadilan. Masyarakat itu hanya dapat menjadi masyarakat yang adil apabila interaksi antarwarganya didasari oleh pengenalan bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam segenap aspek kehidupan. Artinya, hubungan “horizontal” akan makin dominan dibandingkan dengan hubungan “vertikal”. Adil tidak semata-mata merata secara ekonomi, tetapi terutama adil dalam hal setiap warga masyarakat merasa terempas untuk mengaktualisasikan dirinya. Secara idealnya inilah wujud revitalisasi nilai “gotong royong” yang sudah lama kita kenal.

Penonjolan interaksi horizontal, sebagai nilai yang berintikan “gotong royong”, atau “demokrasi” dalam arti modern, akan membawa setiap warga pada keadaan mandiri. Artinya, nilai tersebut menghilangkan rasa ketergantungan pada orang lain untuk mengekspresikan diri dan mencapai sesuatu, apalagi ketergantungan pada konteks hubungan vertikal antarmanusia. Namun, mandiri juga harus berarti yakin bahwa hubungan vertikal yang paling dominan adalah dengan Tuhan YME. Jika sebagian terbesar warga masyarakat sudah mandiri atau mempunyai nilai bahwa kemandirian itu penting baginya, maka dengan sendirinya masyarakat, sebagai kelompok, menjadi mandiri.

Namun, dalam abad mendatang kemandirian bukan hanya berarti kemampuan untuk tidak tergantung kepada orang lain, melainkan juga kemampuan untuk bersaing. Sebagai manusia produktif seseorang akan senantiasa berhadapan dengan orang lain. Dengan demikian, kemandirian itu mengharuskan seseorang untuk mampu bersaing. Kalau tidak, maka ia akan kehilangan sebagian kadar kemandiriannya itu. Lebih jauh lagi, ia harus mampu bersaing di dunia baru yang serba “terbuka”. Keterbukaan ini dituntut, tidak hanya pada saat langsung bergaul dengan manusia dan sistem nilai yang berasal dari masyarakat luar (asing), tetapi juga “langsung” melalui jaringan informasi global, seperti televisi dan internet, yang dimudahkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

Intinya adalah, kita harus berani menghadapi *perubahan* yang memang tidak mungkin kita hindari lagi. Berani dalam mengadaptasi nilai-nilai baru sambil mempertahankan nilai-nilai dasar yang memang kita yakini harus dipertahankan.

Kalau kita dalam, sebenarnya istilah “adaptasi” dan “nilai dasar” saling berkaitan. Mengadaptasi berarti tidak mengambil mentah-mentah, tetapi menyesuaikan hal yang baru dengan keadaan yang sudah ada, yakni dengan sejumlah nilai dasar. Yang akan terlihat adalah “baru”, tetapi akarnya masih tetap kuat. Perubahan tidak seharusnya membuat kita tercabut dari akar budaya kita (*uprooted*).

Pembaruan seringkali dilahirkan oleh sikap inovatif manusia, yakni yang mempunyai atau terbuka pada pemikiran yang secara kualitatif berbeda dengan pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Pada dasarnya setiap manusia harus dipandang sebagai insan berpotensi inovatif, karena setiap manusia mempunyai potensi untuk mandiri. Yang sebenarnya terjadi adalah gerakan tarik-menarik antara “konvensi masyarakat” dan “otonomi manusia”. Makin tinggi otonomi manusia, makin besar pula potensinya untuk menjadi inovator. Masyarakat yang baru, yakni yang adil dan demokratis, akan melahirkan manusia-manusia yang inovatif. Manusia yang inovatif adalah manusia yang mandiri yang diperlukan untuk meningkatkan derajat suatu masyarakat atau bangsa.

Salah satu contohnya adalah dalam bidang seni budaya. Pembangunan seni budaya seringkali ditafsirkan sebagai semata-mata melestarikan yang “lama”, warisan nenek moyang kita. Melestarikan warisan budaya tidak salah, tetapi yang salah adalah pembangunan seni budaya yang tidak mendorong lahirnya ciptaan baru, yakni inovasi. Penciptaan baru sangat penting untuk melahirkan bentuk seni budaya yang “nasionasional” dan “mengglobal”. Dalam masyarakat modern, ini bisa terjadi karena ada kebebasan sehingga tidak ada tekanan terhadap upaya penciptaan. Penciptaan baru dapat menjadi “unsur perekat” bagi integrasi nasional dan media untuk berdialog dengan kebudayaan yang masuk melalui globalisasi. Jadi, dengan penciptaan baru di bidang seni budaya, kita ikut memberi andil dalam percaturan global.

Lebih lanjut, masyarakat baru yang inovatif adalah masyarakat yang dapat kita namakan “berkebudayaan iptek”. Era mendatang disepakati sebagai era ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam era mendatang masyarakat hanya akan bisa hidup secara berkelanjutan apabila mampu menginternalisasikan nilai-nilai yang menjadi landasan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Perlu kita catat bahwa asimilasi ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat tidak terjadi melalui penggabungan ilmu pengetahuan ke dalam kebudayaan dan institusi, melainkan melalui difusi pola-pola aktivitas keilmuan dan peran ilmu pengetahuan dari dunia Barat ke dunia berkembang, termasuk Indonesia. Dari sudut pandang itu, peran ilmu pengetahuan dalam masyarakat kita barulah bersifat superfisial mengingat dewasa ini ilmu pengetahuan belum bersenyawa dengan nilai dan perilaku sebagian besar masyarakat kita. Artinya baru kulitnya saja, itu pun sangat parsial dan sporadis. Tantangan utama di sini adalah meningkatkan kedudukan dan fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hirarki nilai masyarakat agar jangan menjadi subordinasi dari nilai instrumental lainnya.

Dalam era globalisasi, kesempatan terbuka lebih lebar untuk mempercepat proses internalisasi nilai-nilai iptek ke dalam budaya kita. Kontak kultural yang intensif, yang disertai pertukaran informasi yang intensif pula, membuka peluang-peluang kemajuan.

Dengan membangun nilai-nilai kebudayaan sosial dan iptek yang demikian, bangsa kita akan makin mampu bersaing. Lapangan persaingan yang jelas tentunya adalah di bidang ekonomi. Maka kita juga harus membangun nilai-nilai budaya yang akan memperkuat kekuatan ekonomi kita. Nilai-nilai kebudayaan ekonomi itu antara lain adalah etos kerja, kewirausahaan, senantiasa menghasilkan yang terbaik (*to excell*), berdisiplin dan menghargai waktu sebagai “komoditas” yang paling utama.

Nilai-nilai seperti itu tidak dapat kita katakan sebagai nilai-nilai asli yang ada dalam tubuh masyarakat tradisional kita. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat agraris tradisional kita tidak mendorong orang untuk bekerja terlalu keras, mengusahakan yang terbaik, atau menghitung waktu secara rinci. Nilai-nilai yang mencerminkan budaya masyarakat modern itu masih harus ditanamkan dalam masyarakat kita. Tantangan bagi kita adalah bagaimana mendorong proses modernisasi masyarakat tersebut, tanpa menimbulkan guncangan-guncangan yang besar.

Dengan pendekatan yang demikian pula, yaitu menghindari guncangan-guncangan, kita harus melihat keadaan kesenjangan yang menjadi masalah yang sangat peka dalam masyarakat.

Kita tidak boleh menutup-nutupi adanya perasaan kesenjangan itu, tetapi juga akan sangat berbahaya kalau kita mengobarkannya karena akan menyulut emosi dan berakibat merugikan bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Tidak ada orang yang diuntungkan oleh pembakaran toko-toko atau kemacetan ekonomi karena huru-hara. Bahkan kalau ada stagnasi dalam perekonomian, pada analisis terakhir, yang pasti akan paling dirugikan adalah si orang kecil, para pekerja dan konsumen rumah tangga kecil, yang tidak punya banyak pilihan dalam hidup ini.

Saya setuju sekali masalah sosial ekonomi yang kita hadapi itu dibahas secara terbuka, bahkan dalam banyak kegiatan saya turut memelopori pembahasannya. Namun kegiatan itu harus dimaksudkan untuk mencari jalan keluar dan pemecahannya. Itu pun harus dilakukan dengan didasari pengetahuan yang memadai, berdasarkan data dan fakta. Kita harus mengesampingkan emosi dan berbicara dengan kepala dingin, meskipun hati sanubari kita mungkin merasa panas.

Dengan segala keberhasilan pembangunan kita selama ini, yang tidak boleh kita remehkan, dan harus kita syukuri, kita memang harus mengakui bahwa banyak yang masih belum dapat kita wujudkan setelah lebih dari lima puluh tahun merdeka dan dua puluh lima tahun membangun.

Kita masih belum bisa mewujudkan amanat Pasal 27 Ayat (2) UUD 45 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Atau Pasal 33 mengenai demokrasi ekonomi, yakni kemakmuran bagi semua orang, dan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Atau Pasal 34, yakni fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara. Apalagi mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan kalimat terakhir Pembukaan Undang-undang Dasar.

Yang penting, kita mengetahui adanya pesan itu, yang berbahaya adalah kalau kita melupakannya. Yang penting pula adalah kita berusaha untuk menuju ke arah cita-cita itu. Memang rasanya tidak mungkin dalam waktu singkat kita mewujudkannya. Globalisasi, meskipun membuka peluang kemungkinan-kemungkinan untuk mempercepat kemajuan, juga menghadapkan kita pada tantangan. Mungkin karena globalisasi, kita harus mengadakan “*detour*”, jalan melingkar untuk mencapai sasaran-sasaran kita.

Dalam upaya itu saya melihat, kita harus melakukan dua pendekatan.

Pertama, secara konseptual berusaha melihat secara komprehensif wawasan masa depan, tidak boleh hanya terbatas pada aspek atau sektor tertentu. Saling hubungan dan interaksi antara berbagai aspek harus senantiasa diperhitungkan. GBHN telah mengupayakan pendekatan itu. Dalam setiap Repelita dicoba untuk merincinya dan memprogramnya.

Kedua, dalam pencapaiannya tidak bisa kita selalu mengharapkan lompatan-lompatan besar. Dalam mewujudkan konsep yang komprehensif itu, kita harus realistis dan siap dengan pendekatan-pendekatan inkremental. Misalnya, dalam mengatasi kesenjangan, menurut pendapat saya prioritas pertama harus diberikan pada upaya menghilangkan kemiskinan. Karena kemiskinan adalah wujud paling buruk dari kesenjangan, dan sangat bertentangan dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak berarti berbagai bentuk kesenjangan lain diabaikan, itu juga harus diatasi, tetapi kita harus mendahulukan pemberdayaan lapisan masyarakat termiskin agar dapat hidup secara layak. Saya punya kesan, bahwa karena tertutup oleh isu kesenjangan lainnya, seolah-olah pengentasan masyarakat miskin itu menjadi kurang relevan. Padahal di situ terletak masalah yang paling mendasar, dan justru dalam upaya itu kita mencatat kemajuan paling besar, yang sudah diakui oleh seluruh dunia.

Saya punya keyakinan, insya Allah, kita akan menemukan jawaban-jawaban dan format kebijaksanaan yang tepat sambil berjalan dalam mengatasi masalah-masalah kesenjangan lainnya

itu. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan betapa dalam perjalanan sejarahnya mereka juga mengalami proses yang sama. Jepang, yang sekarang disebut sebagai salah satu bangsa yang secara ekonomi paling “egaliter”, antara lain karena sistem perpajakannya yang ketat, juga sebelumnya pernah mengalami keadaan ketimpangan yang tajam. Amerika Serikat, baru setelah memasuki abad ini menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan kesejahteraan dan membatasi kegiatan bisnis dengan aturan-aturan, yakni dengan Anti-trust Law, Small Business Act, Affirmative Action, dan sebagainya.

Apalagi bangsa kita, yang sejak awalnya mengemban cita-cita keadilan sosial. Kita harus percaya bahwa kita senantiasa akan maju melangkah, meskipun mungkin harus selangkah demi selangkah untuk mewujudkan cita-cita itu. Saya ambil contoh, dana 2 persen dari pendapatan bersih masyarakat mampu untuk membantu mengatasi kemiskinan, yang semula berupa himbauan, sekarang sudah jadi kewajiban. Oleh karena itu, saya optimis bahwa bangsa Indonesia akan menemukan cara yang tepat, pada saat yang tepat, untuk mengatasi masalah-masalah sosial ekonominya yang mendasar, dalam mewujudkan cita-cita kebangsaannya.

Salah satu cita-cita kebangsaan itu adalah demokrasi, yang dalam Undang-undang Dasar dirumuskan dengan berbagai rumusan. Dari sini kita sudah mulai harus berbicara mengenai kebudayaan politik.

Saya anggap penting berbicara mengenai membangun kebudayaan politik ini, meskipun banyak pihak memberi penekanan kepada pembangunan sistemnya. Saya punya beberapa alasan untuk mengemukakan, bahwa kebudayaan politik itu harus kita kembangkan untuk menunjang sistem politik yang kita kehendaki. Di sini akan saya kemukakan satu ilustrasi saja.

Dalam sejarah, kita telah mengalami tiga periode di mana UUD 45 menjadi konstitusi negara kita. Dalam UUD 45 itu jelas ada petunjuk mengenai sistem pemerintahan negara yang dikehendaki. Jadi, sistemnya sudah ada. Mungkin masih harus dirinci atau dilengkapi (misalnya, pemilihan umum tidak disebutkan di situ), tetapi sistemnya tertera sangat terang.

Akan tetapi mengapa dalam ketiga periode di mana UUD itu berlaku, kita menjalankan sistem pemerintahan yang berbeda? Pada periode 1945 sampai 1950, dengan UUD 45 itu kita menjalankan pemerintahan parlementer. Ada perdana menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Padahal UUD 45 jelas mengamanatkan sistem pemerintahan presidensial.

Pada periode 1959 - 1966, UUD 45 berlaku kembali. Akan tetapi kemudian ada pengangkatan presiden seumur hidup, padahal UUD 45 tegas menyatakan bahwa presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Begitu pula Ketua-ketua MPR, DPR, Mahkamah Agung menjadi menteri.

Sekarang dalam periode Orde Baru atau periode ketiga berlakunya UUD 45, kita sedang berusaha menerapkan sistem pemerintahan negara menurut kehendak yang murni dari UUD. Dengan sendirinya generasi yang akan datanglah yang menilai apakah sungguh-sungguh dalam periode ini sistem pemerintahan itu telah dilakukan sesuai jiwa dan semangat, selain amanat tertulis, UUD 45.

Oleh karena kita berbicara mengenai jiwa dan semangat, maka kita berbicara mengenai nilai-nilai, dan kalau sudah berbicara mengenai nilai-nilai, maka kita sudah memasuki arena kebudayaan.

Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mengenali kebudayaan politik Pancasila, seperti yang dikehendaki oleh para pendiri republik kita ini. Kita menyadari bahwa dunia terus berkembang, cara pemerintahan juga harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan itu. Oleh karena itulah kita menyatakan Pancasila adalah ideologi yang terbuka, artinya ia dapat

menyesuaikan dan disesuaikan dengan tuntutan setiap zaman. Namun, ada nilai-nilai yang tidak pernah akan berubah.

Memahami keseluruhan konsep itu, merupakan tantangan pula bagi kita dalam membangun masyarakat Indonesia baru.

Salah satu rangkuman nilai yang tidak pernah akan surut adalah konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi.

Masyarakat baru yang kita kehendaki adalah masyarakat yang setiap warganegaranya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam sistem perwakilan yang mencerminkan aspirasi rakyat yang sebesar-besarnya, serta sistem yang menjamin berjalannya mekanisme politik yang berorientasi sebesar-besarnya kepada kepentingan rakyat. Yang juga amat penting adalah meletakkan hukum pada kedudukannya yang tepat. Semuanya itu pada dasarnya merupakan perwujudan demokrasi Pancasila sebagai landasan idiil dalam kehidupan bernegara.

Nilai-nilai normatifnya adalah begitu, bagaimana menerapkannya, merupakan tantangan tersendiri.

Apabila kehidupan sudah sampai pada tahap modern, maka kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya pun akan meningkat. Setelah tiba pada taraf itu kita pun harus menemukan cara yang efektif untuk secara arif me-*“manage”* keterbukaan itu agar di satu pihak menjadi lahan subur bagi berkembangnya demokrasi, tetapi di lain pihak tidak menjadi pemicu perpecahan dan disintegrasi sosial, karena disalahgunakan. Masyarakat memang akan makin terbuka dan kian berani dalam mengartikulasikan aspirasi-aspirasinya, sebab masyarakat secara relatif memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Dalam masyarakat modern, kekuatan atau *power* itu tidak lagi terkonsentrasi pada pemerintah atau negara, melainkan sudah mulai menyebar ke masyarakat luas. Melalui organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan atau *civil society*, dan media massa, masyarakat dengan mudah dan lantang menyuarakan aspirasinya. Dengan demikian, paham etatisme dan turunannya, dalam bentuk apapun, tidak akan relevan dalam sebuah masyarakat modern. Untuk mengantisipasi kecenderungan itu, dan dalam mengembangkan paham demokrasi partisipatif, kita perlu membuka ruang publik secara lebih luas, agar masyarakat mempunyai akses pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingannya sendiri, masyarakat dan bangsanya. Dengan demikian, proses emansipasi politik itu akan berlangsung secara “damai” dan “alamiah”, bebas dari letupan-letupan karena tekanan yang tidak tersalurkan.

Kalau saya mengatakan begitu tidak berarti saya mengadvokasikan peran dan tanggung jawab pemerintah menjadi berkurang. Sebaliknya, tanggung jawab pemerintah sesuai konstitusi tidak boleh pernah berkurang. Bagian-bagian dari kegiatan ekonomi dapat diswastakan, tetapi tanggung jawab pemerintah seperti yang diamanatkan oleh konstitusi tidak bisa diserahkan kepada swasta. Misalnya dalam memerangi kemiskinan, pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta, tetapi tanggung jawab itu tetap melekat pada pemerintah dan tidak boleh beralih pada swasta.

Oleh karena itu, dengan partisipasi masyarakat yang makin luas dalam proses pengambilan keputusan, dengan makin luasnya peran apa yang dinamakan *civil society*, dengan makin kuatnya peran usaha swasta dalam perekonomian, tidak berarti pemerintah menjadi lemah. Kita tidak menghendaki pemerintah yang lemah. UUD juga tidak menghendaki pemerintah yang lemah. Pemerintah yang demokratis tidak harus pemerintah yang lemah.

Kita membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi kuatnya itu adalah karena mandat yang diperolehnya dari rakyat. Bukan kuat karena didukung oleh kekuatan lain selain dari dukungan rakyat. Hanya pemerintah yang kuat yang dapat memperjuangkan kepentingan bangsa dan rakyatnya ke luar dan ke dalam.

Dalam menghadapi era globalisasi, justru pemerintah harus kuat, harus menjadi jangkar bagi stabilitas. Pemerintah yang lemah dapat terombang-ambing dan tidak mampu memberikan arah dan perlindungan bagi rakyatnya. Pemerintah yang lemah tidak akan sanggup menjaga persatuan dan kesatuan dari suatu bangsa yang begitu majemuk seperti bangsa Indonesia. Pemerintah yang lemah tidak akan mampu membangkitkan kepercayaan dunia usaha.

Pemerintah yang kuat tidak berarti lebih kuat daripada hukum atau lebih kuat daripada rakyat berdaulat yang memberinya mandat. Tidak berarti pula semua kegiatan harus ditanganinya. Lebih sedikit kegiatan yang ditanganinya mungkin lebih baik, dan lebih banyak yang ditangani masyarakat mungkin lebih baik lagi. Akan tetapi pemerintah tetap harus kukuh kuat untuk menjaga agar perjalanan bangsa sesuai dengan arah konstitusi. Misalnya, di bidang ekonomi persaingan bebas, seperti antara kelompok ekonomi yang kuat dengan yang lemah, harus dikendalikan, agar yang lemah tidak terhempas oleh yang kuat. Di situlah letak tanggung jawab keberpihakkan pemerintah, bukan keberpihakkan kepada yang salah tetapi kepada yang lemah

Membangun kebudayaan politik dan memantapkan format politik yang aturan-aturan dasarnya telah ditetapkan oleh UUD, harus merupakan salah satu agenda kita dalam membangun masyarakat Indonesia baru itu.

Berkenaan dengan itu pula kita membangun budaya birokrasi kita. Dengan tidak perlu berpanjang lebar kita menyadari betapa banyaknya kelemahan birokrasi kita. Banyak tulisan dan pengamatan telah kita dengar mengenai masalah ini, baik dari kalangan politisi, dari para pelaku ekonomi, para pakar, dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dan kami sendiri yang ada di jajaran pemerintahan juga menyadarinya.

Saya lihat, ditinjau dari sistemnya, birokrasi kita sudah mengikuti sistem administrasi negara yang modern. Tidak berbeda jauh dengan sistem negara lain. Kualitas sumber daya manusianya, walaupun tidak merata, sudah makin baik, dan tidak terlalu jauh tertinggal dari negara-negara berkembang yang baru maju lainnya. Mungkin ketertinggalan kita adalah pada taraf kesejahteraannya. Akan tetapi, menurut hemat saya hal itu sebanding saja dengan taraf kemajuan ekonomi bangsa kita pada umumnya. Artinya, sebanding dengan taraf pendapatan bangsa kita. Rasanya tidak mungkin kita meningkatkan taraf kesejahteraan pegawai negeri secara drastis, dalam keadaan ekonomi masyarakat yang masih banyak tertinggal. Selain itu, ekonomi kita juga tidak mempunyai kemampuan untuk menunjangnya. Peningkatan kesejahteraan aparat birokrasi haruslah dilakukan secara bertahap.

Tentunya kita tidak bisa menunggu sampai taraf kesejahteraan meningkat seperti negara industri atau negara-negara tetangga kita yang sudah lebih maju, untuk memperoleh birokrasi yang bersih dan efisien. Sementara itu, perbaikan birokrasi itu, selain dengan terus-menerus menyempurnakan sistemnya, antara lain dengan merampingkannya, harus diupayakan dengan membangun budaya birokrasi yang menghasilkan birokrasi yang bersih dan berwibawa. Saya pernah mendengar bahwa birokrasi di India relatif bersih, meskipun gajinya tentu tidak berbeda jauh dari kita. Saya tidak mengatakan bahwa mereka lebih baik dari kita (karena bagaimana mengukurnya?), tetapi sebagai perbandingan ada saja manfaatnya.

Begitulah berbagai agenda di hadapan kita dalam membangun masyarakat Indonesia baru, dalam proses menuju masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi cita-cita bangsa kita. Saya punya keyakinan, Insya Allah, bangsa kita dapat mewujudkannya. Kalau bangsa-bangsa lain juga terbukti bisa melampaui tahap-tahap kritis dalam perjalanan sejarah mereka, mengapa kita harus tidak bisa? Jalannya memang tidak selalu lancar, bahkan banyak yang harus melalui pengalaman-pengalaman traumatis. Misalnya, Amerika Serikat harus melalui perang saudara untuk menjadi bangsa industri yang kuat, Jepang harus hancur dulu sebelum bisa bangun kembali dengan lebih mantap dan bahkan menjadi lebih kuat. Eropa harus melalui proses kristalisasi yang panjang, yang

juga penuh ditaburi dengan konflik-konflik fisik yang tidak henti-hentinya bahkan sampai pertengahan abad ini.

Saya berharap kita akan melampaui tahapan transformasi ini dengan selamat dan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Saya pun berharap proses transformasi itu bukan hanya membuat bangsa Indonesia makin maju, mandiri, berkeadilan dan sejahtera, tetapi juga makin kukuh persatuan dan kesatuannya.

Penutup: Harapan kepada HMI

Idealisasi masyarakat baru sebagaimana digambarkan di atas akan bisa dicapai dengan melibatkan peran serta seluruh komponen bangsa. Dalam melaksanakan agenda pembangunan, seperti diuraikan di atas lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan mempunyai peranan yang amat strategis, termasuk HMI. Kita semua mempunyai harapan besar agar HMI dapat turut memainkan peran dalam membangun masyarakat baru yang modern di masa depan, antara lain, sebagai berikut.

Pertama, HMI merupakan organisasi yang menghimpun lapisan elite masyarakat, yakni kelompok mahasiswa, yang menjadi cikal bakal kaum intelektual. Secara sosiologis, kaum intelektual adalah lapisan elite sosial yang memiliki kekuatan pengaruh dalam mendorong perubahan dalam masyarakat. Kita tahu bahwa keunggulan kaum intelektual itu terletak pada ide-idenya, dan ide adalah kekuatan pengubah sejarah masyarakat.

Sebagai sebuah komunitas intelektual, HMI dituntut untuk mengapresiasi secara kreatif dan inovatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. HMI kita harapkan dapat membudayakan sikap masyarakat untuk menguasai dan mengembangkan iptek sebagai tuntutan yang bersifat imperatif, dan kesadaran bahwa iptek adalah kebutuhan dasar di masa depan.

Kedua, sebagai organisasi yang berbasis keagamaan, HMI diharapkan tetap mempertahankan identitasnya dalam memasuki kehidupan modern di masa depan. Sebab, masyarakat modern itu berkecenderungan menafikan faktor agama dalam kehidupannya. Masyarakat dan peradaban modern cenderung berwatak sekular, materialistik dan hedonistik. HMI diharapkan memberikan sumbangan dalam memperkuat wawasan spiritual masyarakat, untuk mampu hidup modern dengan tetap setia kepada keimanan dan amalan Islam.

Ketiga, dalam kaitan dengan usaha memelihara dan mempertahankan integrasi bangsa, HMI juga mempunyai peran besar sebagaimana telah ditunjukkannya selama ini. Kita semua sangat berharap, di masa depan HMI tetap menjaga komitmennya terhadap keutuhan negara-bangsa, serta senantiasa meneguhkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Keempat, HMI merupakan lembaga strategis sebagai wadah pembentukan kepemimpinan. Di masa depan, kita sangat membutuhkan pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh dan memiliki visi yang jelas tentang pembangunan bangsanya. Kepemimpinan yang tangguh dan bervisi itu tidak bisa lahir secara tiba-tiba, tetapi harus melalui suatu proses. Ada masa penempaan, penggodogan, dan pengujian, baik ketika masih menjadi mahasiswa maupun sesudah terjun ke masyarakat luas. Dalam hal ini, HMI diharapkan dapat melanjutkan dan memperkuat tradisinya sebagai wadah dan medan pencetakan kader-kader pemimpin bangsa.

Sekali lagi selamat memperingati hari ulang tahun ke-50. Dirgahayu HMI.

Billahit taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.,